PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 26 Oktober 2026

Nomor : 800.1.2.1/7407/204.2/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kebijakan Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Memperhatikan Surat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.12/37816/031.1/2026 tanggal 20 Oktober 2026 hal Jawaban Pertimbangan Teknis Kebijakan Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dilakukan atas persetujuan DPRD pada tahapan penyusunan APBD induk. Ketentuan ini dimaknai bahwa tidak dapat merubah pagu anggaran TPP ASN dan tidak diperkenankan menaikkan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan setelah pelaporan TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri. Seluruh proses pelaporan, penyesuaian, dan persetujuan pemberian TPP ASN TA 2027 melalui aplikasi SIMONA wajib diselesaikan sebelum Tahun Anggaran 2027 berjalan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41A Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, TPP ASN bagi pejabat fungsional dan pelaksana yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan dan/atau kelas jabatan pada tahun berjalan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh kenaikan jenjang dan kelas jabatan ASN hanya dapat diakomodir dalam pemberian TPP ASN apabila TMT penetapan ditetapkan sebelum TA 2027 serta telah diusulkan dan disetujui dalam Desk Perhitungan Kebutuhan TPP ASN TA 2027 untuk dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri.
4. Berkenaan dengan pertimbangan teknis di atas, disampaikan kepada Saudara bahwa pelaksanaan uji kompetensi kenaikan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhir Tahun Anggaran 2026 ditunda sampai dengan selesainya proses penghitungan dan pelaporan TPP ASN TA 2027.
5. Terkait mekanisme pelaksanaan dan kepastian jadwal kenaikan kelas jabatan pelaksana akan dilakukan pada TA 2027, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan pemberitahuan resmi lebih lanjut setelah terselenggaranya rapat koordinasi teknis bersama seluruh Tim TPP ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran I Surat Kepala BKD Prov. Jatim
Nomor : 800.1.2.1/7407/204.2/2026
Tanggal : 26 Oktober 2026

Daftar Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Pendapatan Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Badan Penghubung Daerah Provinsi
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
10	Bakorwil I Madiun
11	Bakorwil II Bojonegoro
12	Bakorwil III Malang
13	Bakorwil IV Pamekasan
14	Bakorwil V Jember
15	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Kehutanan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23	Dinas Lingkungan Hidup
24	Dinas P3AK
25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
26	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Dinas Pendidikan
30	Dinas Perhubungan
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32	Dinas Perkebunan
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
35	Dinas Peternakan
36	Dinas PR Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
37	Dinas Sosial
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	Inspektorat
40	RSD Prof. dr. Moeljono Surabaya
41	RS Paru Jember
42	RSU Haji Surabaya
43	RSUD Daha Husada
44	RSUD dr. Saiful Anwar Malang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran I Surat Kepala BKD Prov. Jatim
Nomor : 800.1.2.1/7407/204.2/2026
Tanggal : 26 Oktober 2026

No	Perangkat Daerah
45	RSUD dr. Soedono Madiun
46	RSUD Dr. Soetomo Surabaya
47	RSUD Dungus
48	RSUD Husada Prima
49	RSUD Karsa Husada Batu
50	RSUD M. Noer Pamekasan
51	RSUD Sumberglagah
52	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
53	Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
54	Satuan Polisi Pamong Praja
55	Sekretariat DPRD
56	Sekretariat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.